



LAPORAN KINERJA BUSPPMHKP JAKARTA TRIWULAN 1 TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas atas pencapaian sasaran strategis untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Balai Uji Standar Pengendalian dan Keamanan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BUSPPMHKP) Jakarta telah menyusun Laporan Kinerja (LKJ) Triwulan I Tahun 2026.

Laporan Kinerja (LKJ) ini merupakan hasil capaian kinerja BUSPPMHKP Jakarta selama Tahun 2026, LKJ disusun berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BUSPPMHKP Jakarta Tahun 2026. Selain itu LKJ adalah sebagai wujud pertanggungjawaban BUSPPMHKP Jakarta dalam menjalankan visi, misi, tugas dan fungsinya.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja BUSPPMHKP Jakarta. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna sehingga saran dan masukan konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan LKJ ini.

Jakarta, 16 April 2026

Plt.Kepala BUSKIPM



Sigit Hendra Irawan Purnomo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	2
Arah Kebijakan dan Isu Strategis	5
Sistematika Penyajian	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	8
Visi dan Misi	8
Indikator dan Target Kinerja	9
Pengukuran Kinerja	11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	13
Capaian Kinerja	13
Analisis dan Evaluasi Sasaran Kegiatan	38
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	39

Capaian Kinerja Lainnya	39
-------------------------------	----

BAB IV. PENUTUP43

Kesimpulan	43
------------------	----

Rekomendasi	44
-------------------	----

LAMPIRAN	45
----------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi BUSPPMHKP Jakarta Tahun 2026.....	4
Gambar 2.	Status Indeks Capaian IKU.....	11
Gambar 3.	Dashboard NPSS BUSPPMHKP Jakarta Triwulan I Tahun 2026....	13
Gambar 4.	Nilai IP ASN BUSPPMHKP Jakarta Triwulan I Tahun 2026.....	27
Gambar 5.	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Tahun 2026.....	30
Gambar 6.	Rencana Umum Pengadaan BUSPPMHKP Jakarta Tahun 2025 pada aplikasi SIRUP	32
Gambar 7.	Nilai SKM BUSPPMHKP TRIWULAN I Tahun 2025.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah SDM BUSPPMHKP Jakarta Triwulan I Tahun 2026.	3
Tabel 2.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BUSPPMHKP Jakarta Tahun 2026	10
Tabel 3.	Formula perhitungan indeks capaian IKU BUSPPMHKP Jakarta Tahun 2026	12
Tabel 4.	Capaian Kinerja BUSPPMHKP Jakarta Triwulan I Tahun 2026.....	14
Tabel 5.	Target dan realisasi IK1 pada Triwulan I Tahun 2026	15
Tabel 6.	Target dan realisasi IK2 pada Triwulan I Tahun 2026.....	16
Tabel 7.	Target dan realisasi IK3 pada Triwulan I Tahun 2026.....	17
Tabel 8.	Target dan realisasi IK4 pada Triwulan I Tahun 2026.....	20
Tabel 9.	Target dan realisasi IK5 pada Triwulan I Tahun 2026.....	21
Tabel 10.	Target dan realisasi IK6 pada Triwulan I Tahun 2026.....	23
Tabel 11.	Target dan realisasi IK7 pada Triwulan I Tahun 2026.....	23
Tabel 12.	Target dan realisasi IK8 pada Triwulan I Tahun 2026.....	27
Tabel 13.	Pembobotan Nilai Evaluasi AKIP	29
Tabel 14.	Target dan realisasi IK9 pada Triwulan I Tahun 2026.....	29
Tabel 15.	Target dan realisasi IK10 pada Triwulan I Tahun 2026.....	31
Tabel 16.	Target dan realisasi IK11 pada Triwulan I Tahun 2026.....	32
Tabel 17.	Target dan realisasi IK12 pada Triwulan I Tahun 2026.....	34
Tabel 18.	Nilai persepsi, interval SKM, interval konversi SKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan	36
Tabel 19.	Target dan realisasi IK13 pada Triwulan I Tahun 2026.....	36
Tabel 20.	Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan I Tahun 2026.....	39
Tabel 21.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BUSPPMHKP Jakarta Triwulan I Tahun 2026	40
Tabel 22.	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya Berdasarkan Layanan BUSPPMHKP Jakarta Triwulan I Tahun 2026	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja BUSPPMHKP Jakarta Tahun 2025	43
Lampiran 2	Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 Tahun Anggaran 2026	46
Lampiran 3	Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026	48

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Kinerja Balai Uji Standar Pengendalian dan Keamanan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2026, diimplementasikan dalam bentuk sasaran kinerja pada setiap tahunnya. Tahun 2025 terdapat dua buah Sasaran kinerja BUSPPMHKP Jakarta yaitu Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif” dan “Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP”.

Berdasarkan pengukuran kinerja BUSPPMHKP Jakarta Tahun 2025, dalam Aplikasi Kinerjaku (kinerjaku.kkp.go.id). keseluruhan Skor Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kegiatan (IK) BUSPPMHKP Jakarta sebesar 112,93 atau masuk dalam kriteria istimewa (warna biru), dimana IKU dimana IKU yang harus diukur pada Triwulan I Tahun 2026 telah mencapai target, bahkan capaiannya melebihi target. Menurun dibandingkan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 113,92

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BUSPPMHKP Jakarta yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Dari 13 Indikator Kinerja Kegiatan yang targetnya telah ditetapkan pada awal tahun 2026, terdapat 5 IKK (83,33%) yang pengukurannya dilakukan secara semesteran dan tahunan dan 2 IKK (16,64%) yang pengukurannya secara triwulan dan capaiannya melebihi target.
2. IKK yang capaiannya secara triwulan dan melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT BUSPPMHKP Jakarta
 - b. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT BUSPPMHKP Jakarta (Nilai)
 - c. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT BUSPPMHKP Jakarta (Nilai)
 - d. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT BUSPPMHKP Jakarta (%)
 - e. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT BUSPPMHKP Jakarta (indeks)

3. IKK yang pengukurannya dilakukan secara semesteran dan tahunan, yaitu:
 - Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium (ISO 17025) lingkup UPT BUSKIPM
 - Nilai penyelenggaraan SNI ISO/IEC 17043
 - Nilai penyelenggaraan SNI ISO/IEC 17034
 - Jumlah parameter yang dihasilkan laboratorium acuan dan penguji (parameter
 - Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT BUSPPMHKP Jakarta (Nilai)
 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT BUSPPMHKP Jakarta (Nilai)
 - Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT BUSPPMHKP Jakarta (%)
 - Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT BUSPPMHKP Jakarta (Nilai)
 - Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT BUSPPMHKP Jakarta (Nilai)
 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Diimplementasikan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT BUSPPMHKP Jakarta (%)
 - Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP lingkup UPT BUSPPMHKP Jakarta (%)
 - Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT BUSPPMHKP Jakarta (%)
 - Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT BUSPPMHKP Jakarta (indeks)
4. Capaian realisasi anggaran BUSPPMHKP Jakarta Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp 1.616.290.382 atau sebesar 5,82% dari pagu anggaran sebesar Rp 27.749.211.000 sehingga sisa anggaran sebesar Rp 26.132.920.618 atau 94,18%.

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 28/PERMEN-KP/2025, Balai Uji Standar Pengendalian dan Keamanan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BUSPPMHKP) Jakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Uji Uji Standar Pengendalian dan Keamanan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan pengembangan teknik dan metode pengujian karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan dalam rangka Uji Standar Pengendalian dan Keamanan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Oleh karena itu BUSPPMHKP Jakarta mempunyai peranan penting dalam mendukung program peningkatan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

BPPMHKP Jakarta (Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan) berkomitmen penuh menerapkan *good governance* dalam mengendalikan mutu hasil perikanan, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 1999 untuk mencegah KKN. Prinsip ini diwujudkan melalui layanan prima, transparan, dan akuntabel yang didukung oleh digitalisasi serta sertifikasi, guna meningkatkan daya saing ekspor.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BUSPPMHKP Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Triwulan I Tahun 2026 untuk mencapai visi dan misi BUSPPMHKP Jakarta. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja BUSPPMHKP Jakarta. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja (LAKIN) atau LKj-IP merupakan dokumen wajib pertanggungjawaban instansi pemerintah yang disusun berdasarkan amanat regulasi utama, yaitu PP No. 8 Tahun 2006 (Pelaporan Keuangan dan

Kinerja), Perpres No. 29 Tahun 2014 (SAKIP), dan Permenpan RB No. 53 Tahun 2014, guna menjamin akuntabilitas, transparansi, serta pengukuran kinerja yang terukur atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 28/PERMEN-KP/2025 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan BUSPPMHKP JAKARTA mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan pengembangan teknik dan metode pengujian, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan dalam rangka uji standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan Jakarta

Dalam melaksanakan tugasnya, unit pelaksana teknis uji standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang uji standar pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan validasi dan verifikasi metode pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan penyiapan bahan teknis rancangan standardisasi metode pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan uji profisiensi dan pembuatan bahan acuan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
5. Pelaksanaan pengujian mutu dalam rangka uji standar pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan sertifikasi produk penggunaan tanda standar nasional Indonesia dan tanda kesesuaian produk kelautan dan perikanan;
7. Pelaksanaan kerja sama teknis laboratorium;
8. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait uji standar pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;

9. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang uji standar pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan
10. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) BUSPPMHKP Jakarta berjumlah 41 pegawai, dengan rincian seperti pada Tabel.

Tabel 1. Jumlah SDM BUSPPMHKP Jakarta Triwulan I Tahun 2026

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Jabatan Struktural	1	Plt. Kepala/ Katimja. penerapan standar metode uji kesehatan ikan MKHP
2	Jabatan Fungsional Tertentu		
	Inspektur Mutu Ahli Muda	6	
	Inspektur Mutu Ahli Pertama	3	1 PNS dan 2 orang PPPK
	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir	3	
	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	2	
	Pranata Komputer Mahir	1	
	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	PPPK
	Pranata Keuangan APBN Terampil	1	
3	Jabatan Fungsional Umum		
	Analisis Tata Usaha	1	
	Analisis BMN	1	
	Pengadministrasian Keuangan	1	
	Penata Layanan Operasional	5	
	Operator Layanan Operasional	11	2 Orang PPPK dan 9 Paruh Waktu
	Penata Umum Operasional	2	1 Orang PPPK dan 1 Paruh Waktu
	Tenaga Keamanan /Satpam	2	PJLP
	Jumlah	41	

Berpedoman pada struktur penugasan unit eselon III sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme kerja untuk penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka BUSPPMHKP Jakarta selaku UPT eselon III dipimpin oleh Pejabat Administrator, dengan dibantu 4 (empat) Tim Kerja yaitu sebagai berikut :

1. Tim Kerja Dukungan Manajerial, dengan Ketua Raden Ardy Virtanto.
2. Tim Kerja Pengembangan Teknik dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dengan Ketua Sigit Hendra Irawan Purnomo.
3. Tim Kerja Penerapan Standar Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dengan Ketua Hutomo Widiatmojo.
4. Koordinator Fungsional, Iswadi Idris.



Gambar 1. Struktur Tim Kerja BUSKIPM Tahun 2026

ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS

Arah kebijakan dan strategi pembangunan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Arah kebijakan dan isu strategis BUSPPMHKP Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Laboratorium BUSPPMHKP Jakarta untuk mencapai visi nya sebagai penjamin hasil pengujian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta kemananan hayati ikan perlu menerapkan beberapa sistem manajemen mutu, yaitu
 - a. SNI ISO/IEC 17025:2017 untuk laboratorium penguji, semakin bertambah parameter uji yang terakreditasi berarti semakin banyak penjaminan pengujian yang diberikan, hal ini akan mendukung upaya peningkatan daya saing produk perikanan kita.
 - b. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik saat ini sudah menjadi hal mutlak harus dilaksanakan untuk itu penerapan ISO 9001:2015 diharapkan bisa mewujudkan pelayanan prima.
 - c. BUSPPMHKP Jakarta sebagai laboratorium acuan harus bisa menyajikan data perfomance/unjuk kerja laboratorium UPT KIPM kepada BPPMHKP. Untuk itu BUSPPMHKP Jakarta menyelenggarakan uji profisiensi, dengan parameter HPI/HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17043:2016.
 - d. Bahan acuan atau kontrol positif sangat diperlukan oleh laboratorium Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP dalam melakukan pengujian pada beberapa parameter, BUSPPMHKP Jakarta sebagai penyedia bahan acuan saat ini sedang proses akreditasi ISO 17034:2015 sebagai produsen bahan acuan terstandar.
 - e. Sistem penjaminan keamanan dan keselamatan analis dalam bekerja dilaboratorium perlu distandarkan, untuk itu BUSPPMHKP Jakarta juga berupaya untuk menyusun Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium (SMBL).

2. BUSPPMHKP Jakarta sebagai laboratorium acuan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan salah satu fungsinya adalah melakukan pengembangan teknik dan metode pengujian yang sesuai standar nasional dan internasional sebagai respon terhadap perkembangan isu terkini tentang persyaratan ekspor dan perkembangan penyakit,
 - a. Metode pengujian sebelum digunakan oleh laboratorium UPT BPPMHKP harus divalidasi oleh BUSPPMHKP Jakarta dan ditetapkan oleh Pusat SSK menjadi metode terstandar yang harus diterapkan oleh laboratorium UPT KIPM.
 - b. Standar Nasional Indonesia (SNI) pengujian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan penting untuk keseragaman dan sebagai pedoman pengujian laboratorium khususnya lingkup BPPMHKP sehingga akan menghasilkan hasil uji yang akurat. Untuk itu BUSPPMHKP Jakarta sebagai laboratorium acuan, menyusun rancangan SNI (RSNI) dari metode yang telah divalidasi untuk diajukan ke Komtek dan dilakukan pembahasan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai SNI yang bisa dipakai oleh laboratorium penguji.
3. Peningkatan kapasitas/kompetensi BUSPPMHKP Jakarta untuk mewujudkan misi BUSPPMHKP Jakarta sebagai laboratorium referensi/acuan nasional dan regional terus dilakukan mengingat beberapa kondisi sebagai berikut.
 - a. Perkembangan penyakit ikan saat ini sulit diprediksi terutama munculnya beberapa emerging deases.
 - b. Perkembangan persyaratan pengujian mutu produk perikanan yang akan diekspor yang semakin rigid.
 - c. Amanah UU 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan terkait pengawasan perlindungan keanekaragaman hayati.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKJ Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Bab IV Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. Lampiran Memuat Penetapan Kinerja Tahun 2026 dan hal-hal lainnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

VISI DAN MISI

Balai Uji Standar, Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang mempunyai peran sebagai UPT di bidang pelayanan uji standar, Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jakarta dituntut dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan untuk mewujudkan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Dalam rangka menyatukan arah dan mendorong terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi dengan optimal, Sesuai dengan Rencana Strategis BUSPPMHKP Jakarta Tahun 2025-2029, visi pembangunan BUSPPMHKP Jakarta yang ingin dicapai yaitu “Memberikan Jaminan Hasil Pengujian yang Berstandar Nasional dan International”

Untuk mewujudkan visi tersebut, BUSPPMHKP Jakarta telah menetapkan misi yaitu :

- Misi 1. Meningkatkan peran BUSPPMHKP Jakarta sebagai laboratorium acuan UPT BPPMHKP
- Misi 2. Pengembangan teknik dan metoda pengujian sesuai standar nasional dan internasional
- Misi 3. Mewujudkan BUSPPMHKP Jakarta sebagai laboratorium referensi nasional dan regional.

Dengan meningkatkan peran BUSPPMHKP Jakarta sebagai laboratorium acuan UPT KIPM, maka seluruh laboratorium UPT BPPMHKP memiliki acuan yang sama dalam melakukan pemeriksaan komoditas sehingga hasil pengujian akurat dan dapat meningkatkan kepercayaan pengguna layanan. Setiap pengujian berdasarkan metode yang telah tervalidasi sesuai standar nasional dan internasional. Pengembangan metode yang dilakukan oleh BUSPPMHKP Jakarta dapat menjadi rujukan laboratorium nasional dan regional

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang hendak dicapai telah ditetapkan target tiap Indikator Kinerja pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja berbentuk Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2026. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Indikator Kinerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Spesifik (specific);
- b. Dapat terukur (measurable);
- c. Dapat dicapai (attainable);
- d. Berjangka waktu tertentu (time bound); dan
- e. Dapat dipantau dan dikumpulkan (trackable).

Ikhtisar Perjanjian Kinerja BUSPPMHKP Jakarta Tahun 2026 diuraikan seperti pada Tabel 1. berikut ini:

Tabel 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BUSPPMHKP Jakarta Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	1.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium (ISO 17025) lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA	75
		2.	Nilai penyelenggaraan SNI ISO/IEC 17043	75
		3.	Nilai penyelenggaraan SNI ISO/IEC 17034	75
		4.	Jumlah parameter yang dihasilkan laboratorium acuan dan penguji (parameter)	9
SK.2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	5.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (Nilai)	92
		6.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (Nilai)	71,5
		7.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (%)	100
		8.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (Indeks)	82
		9.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (Nilai)	86
		10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (%)	85
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (%)	76
		12.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (%)	70
		13.	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (Indeks)	3,50

PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize.

Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
 - a) Polarisasi Maximize
Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:
$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$
 - b) Polarisasi Minimize
Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:
$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{1 + (1 - \text{Realisasi} / \text{Target})\} \times 100\%$$
 - a) Polarisasi Stabilize
Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.
4. Status indeks capaian IKU dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Gambar 2. Status Indeks Capaian IKU

Formula perhitungan indeks capaian IKU BUSPPMHKP Jakarta, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Formula perhitungan indeks capaian IKU BUSPPMHKP Jakarta Tahun 2026

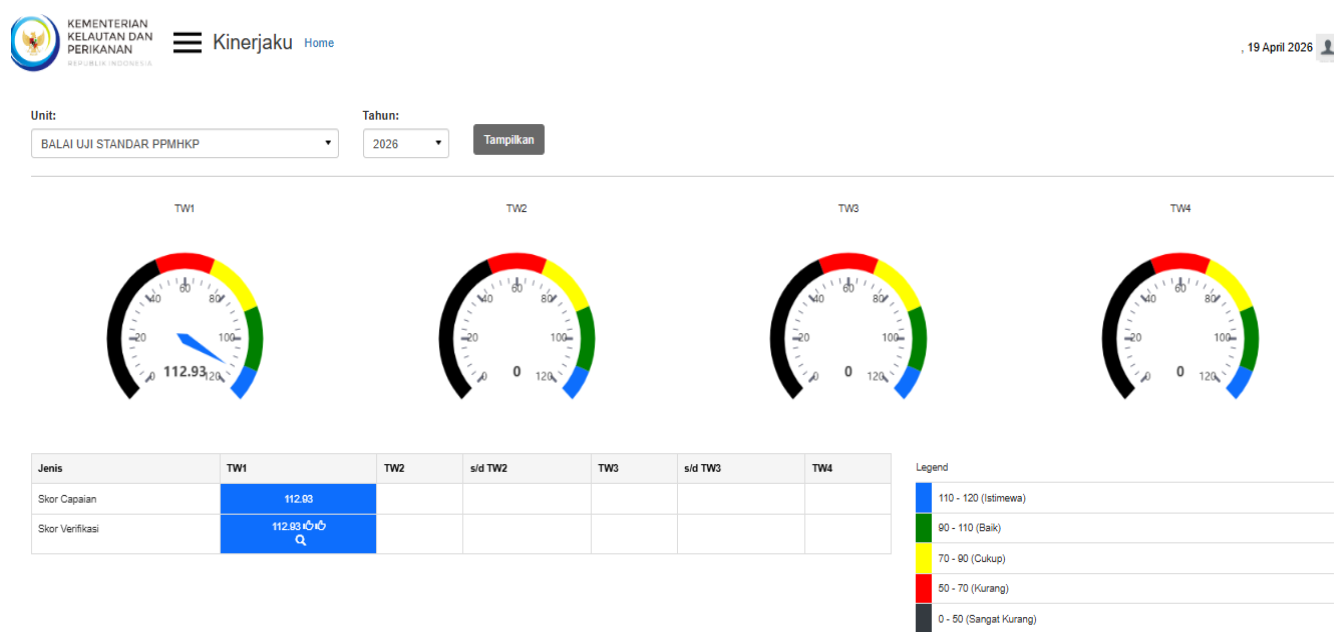
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		FORMULA PENGHITUNGAN
1	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium (ISO 17025) lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA	Polarisasi Maximize
2	Nilai penyelenggaraan SNI ISO/IEC 17043)	Polarisasi Maximize
3	Nilai penyelenggaraan SNI ISO/IEC 17034	Polarisasi Maximize
4	Jumlah parameter yang dihasilkan laboratorium acuan dan penguji (parameter)	Polarisasi Maximize
5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (Nilai)	Polarisasi Maximize
6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (Nilai)	Polarisasi Maximize
7	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (%)	Polarisasi Maximize
8	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (Indeks)	Polarisasi Maximize
9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (Nilai)	Polarisasi Maximize
10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (%)	Polarisasi Maximize
11	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (%)	Polarisasi Maximize
12	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (%)	Polarisasi Maximize
13	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (Indeks)	Polarisasi Maximize

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Balai Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BUSPPMHKP) Jakarta dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang diukur pada Triwulan I Tahun 2026 diatas, telah dilakukan pengukuran menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja (<https://kinerjaku.kkp.go.id/app/login>). Dari hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi pengelolaan kinerja, dapat dilihat kondisi capaian kinerja IKU + IK BUSPPMHKP Jakarta pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 112,93 (Istimewa) sebagaimana Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Dashboard NPSS BUSPPMHKP Jakarta Triwulan I Tahun 2026

Tabel 4. Capaian Kinerja BUSPPMHKP Jakarta Triwulan I Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TRIWULAN I		
			TARGET	REALISASI	%
1	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	1 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium (ISO 17025) lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA	75		
		2 Nilai penyelenggaraan SNI ISO/IEC 17043	75		
		3 Nilai penyelenggaraan SNI ISO/IEC 17034	75		
		4 Jumlah parameter yang dihasilkan laboratorium acuan dan penguji (parameter)	9		
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	5 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (Nilai)	92		
		6 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (Nilai)	71,5		
		7 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (%)	100		
		8 Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (Indeks)	82		
		9 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (Nilai)	86		
		10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (%)	85	100	117,65
		11 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (%)	76	100	120,00
		12 Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (%)	70		
		13 Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (Indeks)	3.50	3,54	101.14

ANALISIS DAN EVALUASI

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan ini diperoleh dari pencapaian beberapa indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:

IK 1. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium (ISO 17025) Lingkup UPT BUSPPMHKP Jakarta

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri, Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji di laboratorium *official control*

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17025 yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup
2. Acuan Normatif
3. Persyaratan Umum
4. Persyaratan Struktural
5. Persyaratan Sumber Daya
6. Persyaratan Proses
7. Persyaratan Sistem Manajemen

Kegiatan yang sudah dilakukan dalam penyelenggaraan SNI ISO/IEC 17025:2017 pada Triwulan I memperoleh nilai 0 karena dinilai pada akhir tahun.

Tabel 5. Target dan Realisasi IK1 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026	Triwulan I			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai penyelenggaraan SNI/ISO/IEC 17025	75	-	-	-	-

IK 2. Nilai Penyelenggaraan SNI ISO/IEC 17043

ISO/IEC 17043 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri, Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji di laboratorium *official control*

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17043 yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup
2. Acuan Normatif
3. Persyaratan Umum
4. Persyaratan Struktural
5. Persyaratan Sumber Daya
6. Persyaratan Proses
7. Persyaratan Sistem Manajemen

Kegiatan yang sudah dilakukan dalam penyelenggaraan SNI ISO/IEC 17043:2023 pada Triwulan II memperoleh nilai 0 karena dinilai pada akhir tahun.

Tabel 6. Target dan Realisasi IK2 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026	Triwulan I			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai Penyelenggaraan SNI ISO/IEC 17043:2023	75	-	-	-	-

IK 3. Nilai Penyelenggaraan SNI ISO/IEC 17034

ISO/IEC 17034 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri, Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji di laboratorium *official control*

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17034 yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup
2. Acuan Normatif
3. Persyaratan Umum
4. Persyaratan Struktural
5. Persyaratan Sumber Daya
6. Persyaratan Proses
7. Persyaratan Sistem Manajemen

Kegiatan yang sudah dilakukan dalam penyelenggaraan SNI ISO/IEC 17034:2016 pada Triwulan I memperoleh nilai 0 karena dinilai pada akhir tahun

Tabel 7 Target dan Realisasi IK3 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026	Triwulan I			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai Penyelenggaraan SNI ISO/IEC 17034:2016	75	-	-	-	-

IK 4. JUMLAH PARAMETER YANG DIHASILKAN LABORATORIUM ACUAN DAN PENGUJI

Kegiatan pada laboratorium acuan dan penguji dalam pemenuhan standar, metodologi dan parameter pengujian yang diperlukan dalam rangka penjaminan mutu dan kesehatan ikan serta mutu dan keamanan hasil perikanan. Sesuai dengan manual IKU target parameter selama Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Rancangan standar metode uji 1 parameter.
2. Jumlah parameter uji profisiensi 2 parameter
3. Pengujian laboratorium mutu 5 parameter
4. Jumlah metode uji yang divalidasi / verifikasi 1 parameter

Berikut uraian dari masing-masing parameter :

1. RANCANGAN STANDAR METODE UJI 1 PARAMETER

Sesuai dengan salah satu fungsi BUSPPMHKP JAKARTA yaitu pelaksanaan rancangan standardisasi metode pengujian, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, BUSKIPM telah menyusun rancangan standar nasional Indonesia (RSNI) metode pengujian penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Rancangan standarisasi sangat diperlukan untuk keseragaman dalam bidang pengujian laboratorium khususnya lingkup BPPMHKP. Selain itu untuk menjadi pedoman pengujian laboratorium sehingga menghasilkan hasil uji laboratorium yang akurat. Rancangan standarisasi ini juga mendukung peningkatan kemampuan teknis pengujian penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan

keamanan pangan terhadap komoditas hasil perikanan yang akan dipasarkan di dalam dan luar negeri.

Rancangan Metode Standar uji Tahun 2026, yaitu:

1. Pengujian *Escherichia coli* coliform dengan menggunakan Membran filter

Kegiatan yang sudah dilakukan pada Triwulan I :

1. Penentuan rancangan metode uji standar
2. Penentuan anggota tim rancangan metode standar
3. Literasi rancangan metode uji standar

2. JUMLAH PARAMETER UJI PROFISIENSI 2 PARAMETER

Uji profisiensi BUSPPMHKP JAKARTA telah terakreditasi ISO 17043, sehingga sudah terstandar secara internasional. Melalui kegiatan Uji profisiensi ini seluruh peserta berkesempatan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di laboratorium masing-masing sehingga memiliki kompetensi yang lebih baik. Kegiatan uji profisiensi ini dikelola oleh Tim Skema Uji Profisiensi (SUP) BUSPPMHKP JAKARTA. Tim Uji Profisiensi bertanggung jawab untuk membuat rencana program, menyiapkan Objek Uji Profisiensi (OUP), melakukan dan menghitung uji homogenitas maupun uji stabilitas, melakukan evaluasi hasil uji homogenitas maupun stabilitas, memberikan kode rahasia untuk masing – masing laboratorium peserta, mengirim Objek Uji Profisiensi (OUP) ke peserta, mengumpulkan hasil pengujian melakukan penghitungan statistik, evaluasi hasil perhitungan statistik, menyusun interim report dan final report.

Parameter uji profisiensi Tahun 2026, antara lain :

1. *Escherichia coli*
2. *Angka Lempeng Total* (ALT)

Kegiatan yang sudah dilakukan pada Triwulan I, antara lain :

1. Penentuan parameter uji profisiensi yaitu parameter *Escherichia coli* dan parameter *Angka Lempeng Total* (ALT)
2. Penentuan anggota tim uji profisiensi
3. Pembuatan SK tim uji profisiensi
4. Uji Pendahuluan dan analisa
5. Pembuatan desain skema uji profisiensi
6. Pendaftaran peserta uji profisiensi

3. PENGUJIAN LABORATORIUM MUTU 5 PARAMETER

Pengujian laboratorium mutu yang akan dilakukan pada tahun 2026 antara lain:

1. *Escherichia coli*
2. Hepatitis A (HAV)
3. Pb (timbal)
4. Cd (kadmium)
5. Hg (merkuri)

Kegiatan yang sudah dilakukan pada Triwulan I, antara lain :

1. Pengujian sampel parameter *Escherichia coli* sebanyak 46 sampel
2. Pengujian sampel parameter Hepatitis A sebanyak 31 sampel
3. Pengujian sampel parameter logam berat Pb sebanyak 5 sampel
4. Pengujian sampel parameter logam berat Cd sebanyak 5 sampel
5. Pengujian sampel parameter logam berat Hg sebanyak 5 sampel

4. JUMLAH METODE UJI YANG DIVALIDASI/ VERIFIKASI 1 PARAMETER

Rencana validasi/verifikasi metode uji, mutu dan kimia Tahun 2025, antara lain :

1. Validasi/Verifikasi Metode Pengujian Cesium 137 pada Produk Perikanan dengan Spektrometri Gamma;

Progres kegiatan validasi/verifikasi metode uji sampai dengan Triwulan I :

1. Penentuan parameter validasi/verifikasi metode uji
2. Penentuan anggota tim validasi/verifikasi metode uji
3. Pembuatan SK tim validasi/verifikasi metode uji
4. Pembuatan proposal verifikasi metode uji

Tabel 8. Target dan Realisasi IK 4 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026	Triwulan I			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Jumlah parameter yang dihasilkan laboratorium acuan dan penguji	9	-	-	-	-

IK 5. PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) LINGKUP BPPMHKP LINGKUP BUSPPMHKP JAKARTA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi :

1. Kualitas Perencanaan Anggaran (20%)
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%)
3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)

Pengukuran indikator kinerja untuk penilaian IKPA sebanyak 8 indikator kinerja, dengan perhitungan bobot berbeda-beda yaitu:

1. Revisi DIPA (10%)
Dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan.
2. Deviasi Halaman III DIPA (10%)
Dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja. Pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA yang disampaikan oleh Satker paling lambat pada hari kerja kesepuluh awal triwulan.
3. Data Kontrak (10%)
Dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen ketepatan waktu (bobot 40%), akselerasi kontrak dini (bobot 30%), dan akselerasi kontrak belanja modal (bobot 30%).
4. Penyelesaian Tagihan (10%)
Dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM LS kontraktual terhadap seluruh SPM LS kontraktual yang diajukan ke KPPN.
5. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
Dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen ketepatan waktu (bobot

50%), persentase GUP (bobot 25%), setoran TUP (bobot 25%).

6. Dispensasi SPM (5%)

Dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampain SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir tahun anggaran. Terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D nya pada triwulan IV.

7. Penyerapan Anggaran (20%)

Dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja anggaran pada setiap triwulan. Nilai kinerja diperoleh dari rasio antara penyerapan terhadap target penyerapan setiap triwulan.

8. Capaian Output (25%)

Dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen ketepatan waktu (bobot 30%) dan capaian RO (bobot 70%).

Target Nilai IKPA lingkup UPT BUSPPMHKP Jakarta tahun 2026 sebesar 92 , dengan pengukuran secara semesteran. Berdasarkan hasil penilaian pada Aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan di laman <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/>

Tabel 9. Target dan Realisasi IK5 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026	Triwulan 1			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM lingkup BUSPPMHKP Jakarta (Nilai)	92	-	-	-	-

IK 6. NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN LINGKUP UPT BUSKIPM

Nilai kinerja perencanaan anggaran menggambarkan capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran. Pelaksanaan Monev Kinerja Penganggaran Tingkat Satker fokus pada evaluasi Aspek Implementasi yang terdiri dari ;

1. Pencapaian Keluaran

Pengukuran tingkat pencapaian keluaran adalah membandingkan antara realisasi capaian keluaran dengan target capaian keluaran. Bobot perhitungan sebesar 43,5%.

2. Efisiensi

Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Bobot perhitungan sebesar 28,6%.

3. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi

Pengukuran tingkat Konsistensi antara perencanaan dan implementasi adalah membandingkan antara realisasi penarikan dana setiap bulan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD). Data realisasi penarikan dana setiap bulan berdasarkan total SP2D yang diterbitkan KPPN dalam satu bulan, sedangkan data RPD berdasarkan Halaman III DIPA. Bobot perhitungan sebesar 18,2%.

4. Penyerapan Anggaran

Pengukuran tingkat penyerapan anggaran adalah membandingkan antara realisasi anggaran dengan total alokasi/pagu anggaran suatu satker. Data realisasi berdasarkan SP2D yang diterbitkan KPPN, sedangkan data pagu berdasarkan DIPA yang telah ditetapkan. Bobot perhitungan sebesar 9,7%.

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) diunduh dari aplikasi SMART DJA Kemenkeu sebagai dasar capaian kinerja anggaran UPT BUSPPMHKP Jakarta . Indikator ini diukur secara tahunan dengan target 71,5.

Tabel 10. Target dan Realisasi IK 6 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026	Triwulan 1			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran lingkup UPT BUSPPMHKP Jakarta (Nilai)	71,5	-	-	-	-

IK 7. PERSENTASE PENYELESAIAN TEMUAN BPK LINGKUP BUSKIPM

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Target persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BUSPPMHKP Jakarta sebesar 100%, dengan pengukuran secara tahunan.

Tabel 11. Target dan Realisasi IK7 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026	Triwulan 1			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BUSPPMHKP Jakarta (%)	100	-	-	-	-

IK 8. INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP BPPMHKP LINGKUP BUSKIPM

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
 - f. Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi*	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/ SM	10
1	Pendidikan DII/ DI/ SMA	5
0	Pendidikan SMP/ SD	1

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/ Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15		
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15		
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0		
	Diklat Fungsional		15	
1	Pernah ikut Diklat Fungsional		15	
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional		0	
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi:

- Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan
- Perilaku Kerja.

Dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d. 90	25
3	Cukup	61 s.d. 75	15
4	Kurang	51 s.d. 60	5
5	Buruk	50 s.d. ke bawah	1

5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi:

- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan
- Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat) dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Up date pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
- Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya
 - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

Adapun kendala yang dihadapi untuk pencapaian IKU tersebut adalah konsistensi peremajaan database kepegawaian oleh para pegawai. Untuk mengantisipasi kendala-kendala tersebut, beberapa upaya telah dilakukan yaitu dengan memberikan motivasi pegawai untuk meningkatkan jenjang pendidikannya serta mengingatkan pegawai dan monitoring e-pegawai setiap triwulan untuk melakukan update data diklat/ seminar pada aplikasi e-pegawai.

Indeks Profesionalitas ASN BUSPPMHKP Jakarta dihitung dengan menghitung rata rata nilai dari seluruh komponen. Capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN BUSPPMHKP Jakarta Triwulan I tahun 2026 sebesar 82,56 dalam kategori Tinggi, meningkat dari capaian pada Triwulan I tahun 2025 sebesar 85,62 dalam kategori Tinggi.



IP ASN 2026

Dashboard

Eselon

Pegawai

FAQ

Tahun 2026

Silakan ketik Nama Unit Kerja

Cari

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
46	STASIUN KIPM BIMA	4	23.75	95 %	30	75 %	25	83.33 %	5	100 %	83.75	TINGGI
47	STASIUN KIPM TAHUNA	9	22.22	88.88 %	27.78	69.45 %	25	83.33 %	5	100 %	80	SEDANG
48	STASIUN KIPM BAU-BAU	10	22	88 %	28.5	71.25 %	25.5	85 %	5	100 %	81	TINGGI
49	STASIUN KIPM MERAK	10	22.5	90 %	29.35	73.38 %	25	83.33 %	5	100 %	81.85	TINGGI
50	STASIUN KIPM MAMUJU	10	23	92 %	29	72.5 %	25	83.33 %	5	100 %	82	TINGGI
51	BALAI UI STANDAR KIPM	18	22.78	91.12 %	30	75 %	25	83.33 %	4.78	95.6 %	82.56	TINGGI

<

1

2

3

>

Gambar 4. Nilai IP ASN BUSKIPM Triwulan I Tahun 2026

Target kinerja Indeks Profesionalitas ASN BUSPPMHKP Jakarta pada tahun 2026 adalah 82, dengan pengukuran secara semesteran.

Tabel 12. Target dan Realisasi IK 8 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026	Triwulan 1			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPPMHKP Lingkup BUSPPMHKP Jakarta (Indeks)	82	-	-	-	-

IK 9. PENILAIAN MANDIRI SAKIP LINGKUP BUSKIPM

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyesuaian terhadap kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja, baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta capaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

Tabel 13. Pembobotan Nilai Evaluasi AKIP

Komponen	Sub-komponen			Total Bobot
	Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Kegiatan penilaian mandiri SAKIP dilakukan secara tahunan melalui aplikasi kinerjaku, dengan target pada tahun 2026 sebesar 86. Dokumen-dokumen yang telah disusun pada Triwulan I tahun 2026, antara lain :

1. Perjanjian Kinerja
2. Manual IKU
3. Rincian Target IKU
4. Rencana Aksi

Tabel 14. Target dan Realisasi IK 9 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026	Triwulan 1			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BUSKIPM	86	-	-	-	-

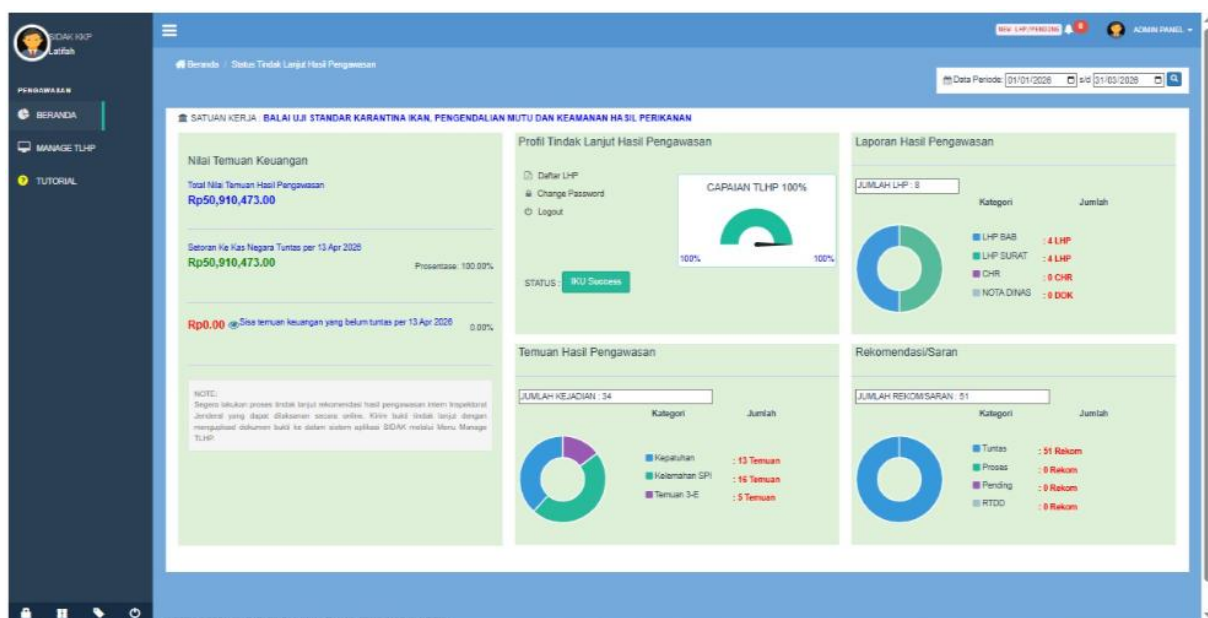
IK 10. PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP BPPMHKP LINGKUP BUSPPMHKP Jakarta

Rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan I Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/ atau tuntas) oleh BUSKIPM yang menjadi objek pengawasan. Hasil pengawasan dari aparat intern yaitu Inspektorat Jenderal KKP pada tahun 2026 telah selesai ditindaklanjuti.

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT BUSPPMHKP Jakarta adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang ditindaklanjuti (tuntas) oleh BUSPPMHKP Jakarta yang menjadi objek pengawasan dengan target selama setahun 85 rekomendasi ditindaklanjuti pada tahun 2025.

Target Triwulan I tahun 2026 sebesar 85 dan telah tercapai sebesar 100 atau 117,65%. Hal tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi hasil pengawasan dari Inspektorat Jenderal KKP telah ditindaklanjuti dengan baik dan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BUSPPMHKP Jakarta berdasarkan dashboard aplikasi tindak lanjut hasil pengawasan pada <http://sidak.kkp.go.id/>.

Gambar 5. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan BUSPPMHKP Jakarta Triwulan 1 Tahun 2026



Tabel 15. Target dan Realisasi IK 10 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026	Triwulan 1			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP lingkup BUSPPMHKP Jakarta	85	85	100,00	117,65	117,65

IK 11. PRESENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN PBJ YANG DIUMUMKAN PADA SIRUP LINGKUP BUSPPMHKP JAKARTA

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Kegiatan dalam rangka pemenuhan target indikator tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan BUSKIPM pada Triwulan I tahun 2026, antara lain :

1. Pengadaan barang/ jasa secara kontraktual, yaitu :
 - Pengadaan Capacity Building Peningkatan Layanan Laboratorium Acuan
 - Pemeliharaan Ruang Laboratorium BUSPPMHKP Jakarta Tahun 2026
 - Pemeliharaan Ruang Pelayanan BUSPPMHKP Jakarta
 - Pengecatan Gedung BUSPPMHKP Jakarta
 - Pengadaan Bahan Pengujian Operasional Laboratorium UPT Tahap I
 - Pengadaan Bahan Pengujian Operasional Laboratorium UPT Tahap II

2. Penyusunan laporan pengadaan barang/ jasa Triwulan I Tahun 2026



Gambar 6. Rencana Umum Pengadaan BUSPPMHKP Jakarta Tahun 2026 pada aplikasi SIRUP

Tabel 16. Target dan Realisasi IK 11 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026	Triwulan 1			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Presentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT BUSPPMHKP Jakarta	76	76	100,00	120,00	120,00

IK 12. PRESENTASE PEMENUHAN DOKUMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS LINGKUP UPT BUSPPMHKP JAKARTA

Presentasi pemenuhan dokumen pembangunan Zona Integritas (ZI) mengacu pada sejauh mana suatu instansi atau unit kerja telah memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan dalam pembangunan ZI, yang bertujuan untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Penilaian pemenuhan ini mencakup dua komponen utama: komponen pengungkit (60%) dan komponen hasil (40%).

Komponen pengungkit mencakup enam area perubahan, yaitu:

1. Manajemen Perubahan:

Meliputi komitmen pimpinan, perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta peningkatan kapasitas SDM.

2. Penataan Tatalaksana:

Meliputi penyederhanaan proses bisnis, peningkatan efisiensi, dan penerapan sistem manajemen kinerja.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM:

Meliputi sistem rekrutmen, promosi, mutasi, dan penilaian kinerja yang berbasis merit.

4. Penguatan Pengawasan:

Meliputi penerapan sistem pengendalian internal, peningkatan efektivitas audit, dan penanganan gratifikasi.

5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja:

Meliputi penyusunan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja yang transparan.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:

Meliputi peningkatan aksesibilitas, kecepatan, kemudahan, dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan.

Komponen hasil mencakup:

1. Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN:

Indikatornya antara lain adalah penurunan jumlah laporan pelanggaran, peningkatan kepatuhan terhadap kode etik, dan peningkatan indeks persepsi korupsi.

2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:

Indikatornya antara lain adalah peningkatan kepuasan masyarakat, penurunan waktu pelayanan, dan peningkatan aksesibilitas pelayanan.

Penilaian dan Presentasi Pemenuhan

• Evaluasi:

Pemenuhan dokumen dinilai melalui evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluasi internal maupun eksternal.

- Indikator:

Setiap area perubahan dan komponen hasil memiliki indikator yang spesifik, yang digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan.

- Presentasi:

Pemenuhan dokumen dipresentasikan dalam bentuk laporan yang berisi data, fakta, dan bukti-bukti yang mendukung pencapaian indikator.

- Nilai:

Total nilai pemenuhan dokumen ZI untuk mencapai WBK/WBBM minimal adalah 85, dengan rincian komponen pengungkit (60%) dan komponen hasil (40%).

Dengan demikian, presentase pemenuhan dokumen pembangunan Zona Integritas mencerminkan sejauh mana suatu instansi atau unit kerja telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip WBK/WBBM, melalui penilaian terhadap komponen pengungkit dan komponen hasil yang terukur.

Tabel 17. Target dan Realisasi IK 12 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026	Triwulan 1			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Presentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas Lingkup UPT BUSPPMHKP Jakarta	70	-	-	-	-

IK 13. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT LAYANAN PUBLIK DI UPT BUSPPMHKP JAKARTA

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BKIPM menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/> yang terpusat pada Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan BPPMHKP yang dibuka setiap triwulan. Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh pengguna jasa. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan;

Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai Survey Kepuasan Masyarakat unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang diisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Tabel 18. Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 1,75	D	Tidak Baik
2	1,76 - 2,50	C	Kurang Baik
3	2,51 - 3,25	B	Baik
4	3,26 - 4,00	A	Sangat Baik

Tabel 19. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan IK13 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026	Triwulan I			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT BUSPPMHKP Jakarta	3.5	3.5	3.54	101.14	101,14

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan nilai SKM layanan publik di BUSPPMHKP JAKARTA, yaitu :

1. Telah dilaksanakan sosialisasi produk layanan Uji Profisiensi BUSPPMHKP JAKARTA di media sosial
2. Telah dilaksanakan sapa layanan pada grup forum pelayanan BUSPPMHKP JAKARTA
3. Telah dilaksanakan sosialisasi Informasi terkait pelaksanaan uji profisiensi di media sosial
4. Telah dilaksanakan penilaian petugas pelayanan terbaik TW I
5. Telah dilaksanakan persiapan dan pengumpulan data survei IKM

Laporan SKM Detail

Home / Laporan / Rekapitulasi per UPP

Data IKM

Kepmen 20/2025 Triwulan 1 2026 Submit

50 Data terakhir Tw 1/2026, untuk selengkapnya silahkan download data dalam bentuk excel

Download Data

10 entries per page

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responden
bmutu	Balai Uji Standar KIPM	2026	1	4.95	88.44	37

Showing 1 to 1 of 1 entries

Download Data

Gambar 7. Nilai SKM BUSPPMHKP Jakarta Triwulan I Tahun 2026

NILAI KINERJA ANGGARAN BKIPM LINGKUP BUSPPMHKP JAKARTA ANALISIS REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran BUSPPMHKP Jakarta Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.10.746.676.000 sesuai DIPA Nomor : SP DIPA-032.13.2.662897/2026 Tanggal 01 Desember 2025. Sumber dana anggaran berasal dari Rupiah Murni sebesar Rp. 27.749.211.000 dan PNBP TA Berjalan sebesar Rp.575.000.000

Capaian realisasi anggaran BUSPPMHKP Jakarta Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp 1.616.290.382 atau sebesar 5,82% dari pagu anggaran sebesar Rp 27.749.211.000 sehingga sisa anggaran sebesar Rp 26.132.920.618 atau 94,18%.

Dengan rincian sebagai berikut :

Pagu Anggaran BUSPPMHKP Jakarta = Rp 27,749,211,000 (Sumber dana SBSN, PNBP, RM)

Realisasi Anggaran BUSPPMHKP TW 1 = Rp 1,616,290,382 (Sumber dana SBSN, PNBP, RM)

Terdiri dari :

Belanja Pegawai : Rp 876,329,065 untuk belanja:

1. gaji PNS dan PPPK bulan Januari sd Maret
2. Tukin PNS dan PPPK Bulan Januari sd Februari
3. THR PNS dan PPPK (Gaji dan TUKIN)

Belanja Barang : Rp 583,484,617 untuk belanja:

1. Listrik
2. Internet
3. Pemeliharaan kendaraan dinas
4. Pemeliharaan gedung
5. Cleaning Servis
6. Gaji PJLP dan PPPK Paruh Waktu Jan sd Feb
7. Makanan/minuman daya tahan tubuh Jan sd Feb
8. Bahan Laboratorium
9. Perjalanan dinas DN
10. Kalibrasi alat laboratorium

Belanja Modal : Rp 156,476,700 belanja untuk pembayaran Termin ke 1 jasa perencanaan Pembangunan gedung laboratorium.

Persentase realisasi anggaran BUSPPMHKP Jakarta Triwulan I Tahun 2026 belum sesuai dengan target realisasi triwulanan yang seharusnya 20% berdasarkan indikator penyerapan anggaran pada reformulasi IKPA. Hal tersebut karena realisasi anggaran belum berpedoman pada rencana penarikan dana yang telah disusun Rekapitulasi berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 20.

**Tabel 20. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja BUSPPMHKP JAKARTA
Triwulan I Tahun 2026**

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	3,921,218,000	876.329.065	22,35
2	Belanja Barang	3.827.993.000	583.484.617	15,24
3	Belanja Modal	20.000.000.000	156.476.700	0,78
TOTAL		10.746.676.000	1.446.346.106	13.46

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

BUSPPMHKP Jakarta telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan penggunaan anggaran, prasarana dan sarana serta SDM yang tersedia. Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, efisiensi anggaran dipandang perlu untuk dilakukan dan dihitung dengan menggunakan formulasi sesuai PMK No.22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

CAPAIAN KINERJA LAINNYA

BUSPPMHKP Jakarta selain mencapai kinerja yang telah ditargetkan sesuai dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, BUSPPMHKP Jakarta juga mempunyai capaian kinerja lainnya, yaitu :

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP BUSPPMHKP Jakarta dengan target yang ditetapkan sebesar Rp. 575.000.000 capaian Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp. 164.381.000 atau sebesar 28,59%.

Tabel 21. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BUSPPMHKP JAKARTA Triwulan I Tahun 2026

NO	KODE AKUN	URAIAN	ESTIMASI	REALISASI	%
1	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	575.000.000	164.381.000	28,59
TOTAL				164.381.000	

Tabel 22. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya Berdasarkan Layanan BUSPPMHKP JAKARTA Triwulan I Tahun 2026

NO	URAIAN	REALISASI
1	Pemeriksaan laboratorium	143.881.000
2	Bahan Acuan	2.500.000
3	Uji Profisiensi	18.000.000
TOTAL		164.381.000

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Balai Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jakarta Triwulan I Tahun 2026 yang tertuang dalam laporan kinerja dapat disimpulkan :

1. Capaian kinerja Balai Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jakarta Triwulan I Tahun 2026 sesuai target dengan Skor Kinerja secara keseluruhan (IKU dan IK) sebesar 112,93 (kinerjaku.kkp.go.id)
2. Hasil capaian tersebut berasal dari 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :
 - a. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jakarta (%)
 - b. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jakarta (%)
 - c. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jakarta (Indeks)
3. Realisasi anggaran BUSPPMHKP Jakarta Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp 1.616.290.382 atau sebesar 5,82% dari pagu anggaran sebesar Rp 27.749.211.000 sehingga sisa anggaran sebesar Rp 26.132.920.618 atau 94,18%

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja BUSPPMHKP Jakarta Triwulan I Tahun 2026, dan sebagai upaya peningkatan kinerja triwulan berikutnya, maka direkomendasikan :

1. Meningkatkan indeks profesionalitas ASN dengan kedisiplinan pegawai dalam melakukan peremajaan database kepegawaiannya dan melakukan monitoring e-pegawai setiap triwulan.
2. Monitoring kegiatan pada triwulan I sesuai jadwal atau rencana operasional kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapat diserap sesuai target.
3. Meningkatkan nilai SKM dengan Pengembangan aplikasi SIMLAB dan Memberikan pelatihan khusus terkait service excelen

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BUSPPMHKP Jakarta Tahun 2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070, FAKSIMILE (021) 3513282
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL sst.bppmhkp@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BALAI UJI STANDAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sigit Hendra Irawan Purnomo**
Jabatan : **Plt. Kepala Balai Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jakarta**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : **Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Uji Standar Pengendalian
dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan Jakarta



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sigit Hendra Irawan Purnomo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI UJI STANDAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	1.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium (ISO 17025) lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA	75
		2.	Nilai penyelenggaraan SNI ISO/IEC 17043	75
		3.	Nilai penyelenggaraan SNI ISO/IEC 17034	75
		4.	Jumlah parameter yang dihasilkan laboratorium acuan dan penguji (parameter)	9
SK.2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	5.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (Nilai)	92
		6.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (Nilai)	71,5
		7.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (%)	100
		8.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (Indeks)	82
		9.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (Nilai)	86
		10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (%)	85
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (%)	76
		12.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (%)	70
		13.	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT BUSPPMHKP JAKARTA (Indeks)	3,50

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	20,200,000,000
2.	Manajemen Mutu	2,032,250,000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	5,516,961,000
Total Anggaran Balai Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jakarta Tahun 2026		27,749,211,000

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Pit. Kepala Balai Uji Standar Pengendalian
dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan Jakarta



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sigit Hendra Irawan Purnomo

Lampiran 2 : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 Tahun Anggaran 2026

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 283/SJ.7/PL.410/IV/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 Tahun Anggaran 2026

Lampiran : Satu berkas

Tanggal : 7 April 2026

Sehubungan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengumuman RUP dalam aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) merupakan kewajiban Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Hasil rekapitulasi Capaian IKU Persentase RUP Terumumkan dari 156 (seratus lima puluh enam) Satuan Kerja Pengelola DIPA Aktif sesuai pagu anggaran yang tersedia lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026 periode Triwulan 1 sampai dengan waktu cut off tanggal 7 April 2025 pukul 22:00 WIB sebesar **99,75%**. (daftar rekapitulasi terampir);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara berkenan untuk melakukan perbaikan/penyesuaian data sesuai ketersediaan anggaran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

No	Kode E1 / Sater	Nama Sater	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN TOTAL			
13		BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	304,871,258,000	304,871,258,000			
15	649788	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA II	3,290,509,000	3,290,509,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
16	649640	BALAI KIPM DAN KHP TJ. PINANG	388,074,000	388,074,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
17	649572	BALAI KIPM DAN KHP TARAKAN	872,480,000	872,480,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
18	662897	BALAI UJI STANDAR KIPM DAN KHP	23,387,383,000	23,387,383,000	0	100.00%	Sudah Sesuai

Lampiran 3 : Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LADANG), FAKSIMILE (021) 3513282
 LAMAN www.kkp.go.id SUREL ppm@kp.go.id

Nomor : 1066/BPPMHKP.1/HM.450/IV/2026 10 April 2026
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 berkas
 Hal : Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026

Yth. (Daftar Terlampir)
 Di tempat

Sehubungan dengan berakhirnya periode Triwulan I tahun 2026 telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan OP BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OP).

Target Indeks SKM yang ditetapkan pada Triwulan I tahun 2026 adalah 3,5 sebagaimana telah teruang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026 masing-masing OP lingkup BPPMHKP. Sebagai pedoman perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pada periode berikutnya, berikut adalah capaian dari hasil validasi SKM berdasarkan Nota Dinas Nomor 1273/SJ.B/TU.140/IV/2026 perihal Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2026 oleh Kepala Pusat Data dan Informasi.

- Indeks SKM yang didapatkan dari seluruh OP BPPMHKP pada Triwulan I Tahun 2026 adalah **3,85** dan mutu pelayanan diperoleh "A" kategori "Sangat Baik". Jumlah responden yang diperoleh sebanyak 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) responden yang melakukan survei.
- Jumlah OP BPPMHKP yang mendapatkan nilai SKM dengan kategori sangat baik tercatat sebanyak 46 (empat puluh enam) OP dan kategori baik sebanyak 1 (satu) OP. OP dengan nilai SKM tertinggi dinah oleh Stasiun PPMHKP Gorontalo, Stasiun PPMHKP Palu, dan Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan .

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2

3. Hasil SKM berdasarkan rekap per produk layanan dari 13 (tiga belas) produk layanan terdapat 9 (sembilan) layanan mendapatkan kategori "Sangat Baik" dan 1 (satu) produk layanan mendapatkan kategori "Baik" yaitu Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB). Kemudian, terdapat 3 (tiga) produk layanan yang tidak memiliki responden yaitu Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPOIB), Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB), dan Sertifikat keikutsertaan dan final report.

4. Rekapitulasi per unsur layanan didapatkan rincian nilai sebagai berikut:

Unsur Layanan	Indeks	Nilai SKM
Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan	3,88	97,01
Unsur 2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	3,88	96,56
Unsur 3 : Waktu Penyelesaian Pelayanan	3,85	96,15
Unsur 4 : Biaya/Tarif Pelayanan	3,88	96,55
Unsur 5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,88	96,49
Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana	3,79	94,74
Unsur 7 : Perilaku Pelaksana	3,81	95,13
Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,87	96,76
Unsur 9 : Sarana dan Prasarana	3,85	96,31

Nilai terendah ada pada 3 (tiga) unsur yakni U6 (Kompetensi Pelaksana), U7 (Perilaku Pelaksana) dan U3 (Waktu Penyelesaian Pelayanan).

5. Berdasarkan hasil validasi tersebut mohon kepada kepala OP untuk dapat memberikan perhatian lebih pada produk layanan dan unsur layanan yang mempunyai nilai rendah, serta kritik dan saran dalam melakukan tindak lanjut perbaikan pada aspek-aspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur pelayanan pada seluruh jenis layanan yang diampu oleh OP masing-masing.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan PPMHKP
Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan,



Dianandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Tembusan:
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Dokumen ini telah disandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara

3

Lampiran Surat Dinas

Nomor : 1086/BPPMHKP.1/HM.450/1V/2026

Tanggal : 10 April 2026

Kepala Unit Kerja lingkup Badan PPMHKP

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu
2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer
3. Kepala Pusat Mutu Pascapanen
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP
5. Plt. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP

a.n. Kepala Badan PPMHKP
Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

4

Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OP) lingkup BPPMHKP Triwulan I Tahun 2026

NO	OP	INDEKS PER-UNSUR LAYANAN									INDEKS	NILAI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	Metode SKM
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
46	Balai Uji Standar PPMHKP Jakarta	3,68	3,59	3,38	3,59	3,54	3,41	3,51	3,59	3,54	3,54	88,44	A	Sangat Baik	37	Online



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Jalan Raya Setu No 1 setu cipayung, RT.3/RW.3, Setu,
Jakarta Timur, DKI Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13880
Telp : (021) 8448506
Email : buskipm@gmail.com